

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini organisasi sektor publik terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan UU pertama yang dikeluarkan berkenaan dengan otonomi daerah setelah dikeluarkannya Tap MPR RI No. IV/MPR/2000.

Menurut (Indra Bastian, 2013) Akuntansi Sektor Publik ialah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang ditetapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Organisasi sektor publik sendiri dalam prosesnya sekarang ini dimodifikasi dengan adanya fenomena menguatnya akuntabilitas dari organisasi publik itu sendiri, baik dalam pusat atau daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban seseorang ataupun instansi yang telah menentukan pilihannya dengan tindakannya.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami, sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan baik itu pihak internal maupun eksternal suatu organisasi.

Laporan keuangan ialah bentuk tanggung jawab atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang dihasilkan juga harus memenuhi prinsip tepat waktu dan susunannya disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 pada Tahun 2005 yang digantikan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 pada Tahun 2010 yaitu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan atas dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) adalah pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengakses hasil yang berhasil dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang telah diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Informasi didalam sebuah laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan pemerintah, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan yang tersedia, termasuk laporan non keuangan dapat dilaporkan bersama-sama

dengan laporan keuangan. Untuk gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan satu periode.

Pemilihan SKPD Kota DKI Jakarta sebagai objek penelitian karena daerah ini menunjukkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah menunjukkan peningkatan atas kualitas laporan dan pertanggung jawabannya. Dimana dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta meraih opini WTP tiga kali berturut-turut. Untuk tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 badan pemeriksaan keuangan (BPK) memberikan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017, 2018 dan 2019.

Opini ini diberikan karena nilai akuntabilitas kinerja daerah ini mendapatkan nilai “A” Opini WTP merupakan penilaian profesional pemeriksaan atas kewajaran informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bukan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari kecurangan. Maka dari itu diharapkan dengan adanya hasil audit BPK selama kurang lebih 3 tahun mempertahankan predikat WTP nya dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain, kemudian peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang saat ini diperkuat Kota DKI Jakarta sehingga bisa mempertahankan predikat WTP tersebut.

Tabel 1.1

Opini BPK

No	Nama Pemda	Opini BPK			
		2016	2017	2018	2019
1.	DKI Jakarta		WTP	WTP	WTP
2.	Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP

(Lanjutan)

Tabel 1.1

	Bantul				
3.	Kabupaten Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh laporan keuangan daerah, diantaranya yang dilakukan oleh (Muid, 2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini mendukung penelitian Agum Gumelar (2017), Putriasri (2017), Dhedy Triwardana (2017), Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghysella (2017), Emilda (2014), Erwin (2018), Asyiyhatul (2017), Ihsanti (2014) dan Natalya (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Kadek Desiana (2014), Iskandar Muda, Deni Yuwilia wardani (2017), Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, Muhyarayah (2016), Dadang Suwarda (2015), Nurul Nadila, dan Nurhasanah (2018) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012), Ade Indriani Dachi, Erlina, Rina Br. Bukit (2019), Syarifudin (2014), Shinta (2017), Emilda (2017), Nurul Sartika (2019), Ikang Murapi (2016) dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Delanno dan Deviani (2013), Ida (2016), Nurillah (2014), Fikri (2015), Udiyanti (2014), Nur Fitri Dewi, Ferdaus Azam dan Siti Khalidah (2019) dan Aditya Sanjaya (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Shinta (2017), Budi (2016), Yendrawati (2013), Agum Gumelar (2017), Nurhasanah Firmansyah dan Kurnia Sari (2018), Desi Sefri Yensi (2014), Asysyihatul Latifah (2017) dan Rizal (2015) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan pada Kota DKI Jakarta, sehingga penelitian ini diberi judul :

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kota DKI Jakarta).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan memiliki adanya kebermanfaatan bagi semua pihak yang membaca ataupun secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu

Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat kontribusi dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi serta efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan dalam instansi pemerintah. Terlebih kaitannya dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, teknologi informasi dan kecerdasan intelektual.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi ataupun tambahan data untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama.